

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2021 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan dan Fungsi	17
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN OGAN ILIR....	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	26
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2022	28
BAB 5 PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Perencanaan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Ogan Ilir	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Ogan Ilir	15
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir	26
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 sehingga diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ilir Tahun 2021 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
13. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir ini, adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber pendanaan;
2. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan segenap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dalam menyusun berbagai kebijakan,

maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana ini, adalah:

1. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan, dan akuntabel serta konsisten dengan dengan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja DPMPTSP dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan Awal Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian
Renstra DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN OGAN ILIR

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2021 menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel 2.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi

hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan tahun 2026

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DAN PERENCANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN OGAN ILIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program) dan Keluaran (Kegiatan) s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022		Catatan
					Target Renja 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi DPMPSTP	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	7 Laporan	100	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan dan Ranwal	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pencapaian kinerja Perangkat Daerah (Lakip, LPPD, Tapkin, LKPJ, Realisasi fisik Keuangan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	98	98	98	98	98	98	98	98	

2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	14 Bulan	14 Bulan	14 bulan	14 Bulan	98	14 Bulan	14 Bulan	98	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98	1 Laporan	1 Laporan	98	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kompetensi ASN	90	90	90	90	90	90	90	90	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	90	30 Stel	30 Stel	90	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	90	5 orang	5 orang	90	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan komponen Operasional kantor	98	98	98	98	98	98	98	98	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah penggunaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	25000	25000	100	

	Penggandaan										
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	200 Laporan	200 Laporan	100	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang administrasi perkantoran	98	98	98	98	98	98	98	98	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98	12 Bulan	12 Bulan	98	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau	1 Tahun , 4 Unit	1 Tahun , 4 Unit	1 Tahun , 4 Unit	1 Tahun, 4 Unit	100	1 Tahun, 4 Unit	1 Tahun, 4 Unit	100	

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	operasional kendaraan dinas roda 4 (1 unit) dan kendaraan dinas roda 2 (3 Unit)										
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100		
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perbaikan yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Ada Dokumen	100	ADA	100	100		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RUPM	100	100	100	100	100	100	100	100		
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya dokumen potensi investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promo investasi	1 Pameran	1 Pameran	1 Pameran	1 Pameran	100	1 Pameran	1 Pameran	100		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Ada Dokumen	100%	ADA	100	100		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	100	100	100	100	100	100	100	100		

	Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	bidang Penanaman Modal									
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya sosialisasi perizinan dan non perizinan ke Kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100	16 kecamatan	16 kecamatan	100	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyaran Rupiah)	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen laporan LKPM dan terawasnya Perusahaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	90	90	100	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen Laporan LKPM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang di movev	20 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data	Tersedianya laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4	100	4 Laporan	4 Laporan	100	

	dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	data perizinan				Laporan					
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya laporan data perizinan dan dokumen penyederhanaan perizinan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100	

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat realisasi capaian kinerja sampai dengan pertanggal 20 Desember pada tahun anggaran 2021 ini ada beberapa kegiatan untuk capaian kinerjanya masih dibawah target. Hal ini lebih disebabkan karena pengurangan anggaran akibat refocusing covid 19 dan pandemi covid, seperti pameran HUT OI yang dibatalkan. Selanjutnya untuk kegiatan lainnya yang bersifat dokumen dapat di selesaikan hingga saat ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 – 2026 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir disajikan pada Tabel 2.2. (terlampir). Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPSTP
KABUPATEN OGAN ILIR

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indeks Kepuasan masyarakat	-	-	NA	80	82	84	82,57		82	84	
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	-	-	10.303 T	10.400 T	10.600 T	10.800 T	272 T		10.600 T	10.800 T	
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	15	20	22	24	15		22	24	
4	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota			9,25	10,00	12,50	15,00	85		12,50	15,00	

5	Rata-rata hari proses perijinan investasi (hari)			5	4	4	4	5		4	4	
---	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	--

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir baik, tetapi beberapa kegiatan kedepan untuk menjadi perhatian masih perlu ada perbaikan kinerja.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi teknis yang menangani penanaman modal di Kabupaten Ogan Ilir sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor penanaman modal dalam lima tahun mendatang sehingga mampu melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal.
2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan SKPD yang terkait diharapkan dapat berjalan lebih baik dan menunjang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD 2021-2026, setiap SKPD yang terkait mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional. Meski pernyataan ini bersifat normatif dan terdengar klasik, namun upaya penyediaan kerangka regulasinya sudah menampakkan hasil yang diantaranya dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. PTSP diyakini menjadi salah satu instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan daya saing penanaman modal.

3. Kemajuan di bidang Iptek, tata kelola dan kompetensi SDM serta kecukupan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan Pelayanan dan Perizinan serta berinvestasi dengan indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui Online Single Submission (OSS), penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir sehingga dapat meningkatkan jumlah Investor di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Kondisi Potensi Sumber daya alam dan manusianya yang dapat memberikan peluang untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan. Meski pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan menjadi bagian dari target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun diyakini pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sehingga dapat mencapai target dalam tahun-tahun mendatang yang merupakan cerminan potensi makro ekonomi Daerah.
5. Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan yaitu dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, tepat waktu, dan ada kepastian biaya.
6. Melakukan Sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat akan kesadaran kepemilikan izin pada usahanya sehingga dapat meningkatkan nilai investasi serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan izin yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada perusahaan yang tidak taat aturan.

Permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Ogan Ilir, dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh Perangkat Daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengembangan pelayanan tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM yang kurang sehingga dalam pengembangan pelayanan, terdapat posisi yang tidak ada pegawai (adanya double job pegawai);
2. Adanya perubahan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja rincian perubahan tersebut. ;

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2021 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui Sosialisasi dan Promosi tentang kemudahan dan pelayanan perizinan secara tidak langsung akan menumbuhkan minat masyarakat maupun investor untuk membuat usaha di kabupaten Ogan Ilir serta meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten.
2. Pengembangan kompetensi pegawai sehingga dapat memperlancar dan menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai ikon pelayanan di Kabupaten Ogan Ilir;

3. Pembinaan dan sosialisasi yang regular dilakukan agar masyarakat paham dan mengetahui perubahan peraturan perundang-undangan;
4. Peluang Potensi Usaha di Kabupaten Ogan Ilir yang besar dapat mengundang dan menambah minat investor untuk masuk ke Kabupaten Ogan Ilir.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk optimalisasi koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembangunan dapat dicapai.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DPMPSTP KABUPATEN OGAN ILIR

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 menanggapi bencana pandemic COVID-19 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang dijabarkan menjadi 7 (Tujuh) Prioritas Nasional, yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - Pelaksanaannya di antaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan;
 - Penguatan penyediaan energi yang terjangkau;
 - Penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor;
 - Pemulihan pariwisata nasional dengan;
 - Meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata;
 - Penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - Melanjutkan transformasi sosial ekonomi;

- Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah;
 - Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial;
 - Peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *Health Security*;
 - Peningkatan pemerataan layanan berkualitas;
 - Penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual;
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif;
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi COVID-19.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu;
 - Pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan;
 - Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran;
 - Serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman;
 - Peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - Peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - Peningkatan ketahanan infrastruktur;
 - Optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
 - Peningkatan konektivitas wilayah;
 - Pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan;
 - Peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik;
 - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;
 - Optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi COVID-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan. vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi);
 - Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - Penguatan perlindungan WNI di luar negeri;
 - Intensifikasi kerja sama pembangunan internasional;
 - Optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing*;
 - Pemulihan kinerja pelayanan publik.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2021 mengacu pada Prioritas Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Program Prioritas RKP Tahun 2021 mengacu pada Arah Kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2021 mengacu pada Strategi dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

3.1.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan visi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 5 (Lima) Prioritas

Pembangunan dan 15 (lima belas) Program Prioritas Daerah, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yaitu :
 - Maju kesehatan masyarakat
 - Maju akses pendidikan berkualitas
 - Maju pembangunan responsive gender dan perlindungan anak
 - Maju pelayanan public berkualitas
 - Maju pembangunan yang transparan dan akuntabel
 - Maju aparatur professional dan berintegritas
 - Maju pemuda dan olahraga

- b. Penguatan konektivitas, Kualitas Insfrastruktur dan Energi yaitu :
 - Maju insfrastruktur dan konektivitas
 - Maju akses energi

- c. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan
 - Maju ekonomi kerakyatan .
 - Maju investasi, industry dan perdagangan
 - Maju kesejahteraan masyarakat .
 - Maju seni, budaya dan pariwisata .

- d. Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Maju Pertanian rakyat dan Kedaulatan Pangan

- Maju kualitas lingkungan
- e. stabilitas Keamanan dan Kehidupan Beragama
- Maju stabilitas keamanan, ketertiban dan kehidupan beragama

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir **“OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA MORAL DAN ETIKA”** maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir mengambil Misi 1 (satu) dari 5 (lima) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

“MEMBANGKITKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN PELAYANAN MASYARAKAT SECARA INOVATIF KREATIF, BERBUDAYA DAN BERTANGGUNG JAWAB”.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Ogan Ilir, maka tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari penjabaran misi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR

RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
Membangkitkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Pelayanan Masyarakat Secara Inovatif Kreatif, Berbudaya dan bertanggung Jawab				
	Tujuan RPJMD: Meningkatkan kualitas daya saing perekonomian (RPJMD)		Laju pertumbuhan ekonomi	2,57
		Sasaran RPJMD : Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	12,5
RENCANA STRATEGIS				
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di kabupaten ilir (Renstra)		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN / PMA) (Rupiah Juta)	10,600
		Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22
	Meningkatkan standar mutu pelayanan perizinan terpadu satu pintu (RENSTRA)		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat	82 %

		Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat	82
--	--	--	---	----

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan, Rencana Kerja DPMPTSP Ogan Ilir Tahun 2023 mencakup 5 program, 11 Kegiatan, dan 30 sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaaan Aset Tetap Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Pelayanan terhadap Perangkat Daerah PMPTSP	Indralaya	82	5.065.301.152	APBD
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Indralaya	10	33.000.000	APBD
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	Indralaya	6	11.000.000	APBD
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pencapaian kinerja Perangkat Daerah	Indralaya	4	22.000.000	APBD
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	Indralaya	95	3.503.495.152	APBD
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Indralaya	14	3.329.695.152	APBD
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Indralaya	12	154.000.000	APBD
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Indralaya	1	19.800.000	APBD
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kompetensi ASN	Indralaya	91	109.400.000	APBD
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas	Indralaya	50	50.000.000	APBD
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Diklat	Indralaya	12	59.400.000	APBD
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan komponen operasional kantor	Indralaya	98	493.480.000	APBD
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	Indralaya	12	13.750.000	APBD
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indralaya	12	25.300.000	APBD
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Indralaya	12	16.500.000	APBD
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan ATK dan Makan Minum	Indralaya	53	54.500.000	APBD
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan plat IMB dan penggandaan	Indralaya	12	40.000.000	APBD
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Indralaya	12	343.430.000	APBD
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana penunjang ASN	Indralaya	34	458.710.000	APBD
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Indralaya	3	108.000.000	APBD

2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel,Rak Koran, Tempat Brosur,Kursi,Meja Kantor	Indralaya	8	86.500.000	APBD
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Laptop,Tablet, PC dan Printer	Indralaya	19	230.000.000	APBD
2	18	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Brangkas	Indralaya	4	34.210.000	APBD
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang administrasi perkantoran	Indralaya	98	211.700.000	APBD
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai, Buku Cek, Jasa Kirim Paket	Indralaya	12	8.700.000	APBD
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, internet,Air dan listrik	Indralaya	12	41.000.000	APBD
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer jasa pelayanan administrasi perkantoran	Indralaya	12	162.000.000	APBD
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Indralaya	87	255.516.000	APBD
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional kendaraan dinas roda 4 (1 unit) dan kendaraan dinas roda 2 (3 Unit)	Indralaya	8	97.636.000	APBD
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor	Indralaya	1	96.500.000	APBD
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Indralaya	12	61.380.000	APBD
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Indralaya	22	207.240.000	APBD
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RUPM	Indralaya	1	207.240.000	APBD
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Potensi Investasi	Indralaya	1	108.570.000	APBD
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Investasi	Indralaya	2	98.670.000	APBD
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	Indralaya	12,50	258.610.000	APBD
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Nonperizinan bidang Penanaman Modal	Indralaya	16	258.610.000	APBD
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan ke Kecamatan	Indralaya	16	180.290.000	APBD

					secara Elektronik					
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Pemberian Insentif Daerah terhadap SKPD Pelayanan Penanaman Modal	Indralaya	1	78.320.000	APBD
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyaran Rupiah	Indralaya	4	112.353.367	APBD
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Laporan LKPM dan terawasanya Perusahaan	Indralaya	1	112.353.367	APBD
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen Laporan LKPM	Indralaya	1	80.000.000	APBD
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang di Monev	Indralaya	20	32.353.367	APBD
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Indralaya	100.600	129.800.000	APBD
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan data perizinan	Indralaya	4	129.800.000	APBD
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Laporan data perizinan dan dokumen penyederhanaan perizinan	Indralaya	4	129.800.000	APBD

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awalan Rencana Kerja (Renja) DPMPSTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2023. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk

menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023. Namun hal ini tentunya tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah ditetapkan sangat ditentukan peran, tanggung jawab, serta kinerja dari seluruh jajaran pegawai DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan agar tercapai kinerja DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sebagai lembaga yang handal, koordinatif, inovatif, dan implementatif dalam mendukung terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul, dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indralaya, Desember 2021

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Ogan Ilir,



MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196502021986111002